

RENCANA KERJA

RENJA

TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KAB. TANAH LAUT**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**RENCANA KERJA
(RENJA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT**



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
 22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);

23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024-2026.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke 1 (satu) dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
- a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD/Prioritas Plafon Anggaran Sementara, khususnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025; dan
 - b. bahan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari Rencana Kerja Perangkat Daerah:
- A. Urusan Wajib:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 5) Dinas Perhubungan;
 - 6) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 7) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - 11) Dinas Sosial;
 - 12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - 13) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 14) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - 15) Sekretariat Daerah;
 - 16) Sekretariat DPRD;
 - 17) Badan Pendapatan Daerah;
 - 18) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 19) Inspektorat Kabupaten;
 - 20) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 22) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 23) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - 24) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 25) Kecamatan Pelaihari;

- 26) Kecamatan Tambang Ulang;
- 27) Kecamatan Kurau ;
- 28) Kecamatan Bati-Bati;
- 29) Kecamatan Batu Ampar;
- 30) Kecamatan Panyipatan;
- 31) Kecamatan Takisung;
- 32) Kecamatan Jorong;
- 33) Kecamatan Kintap;
- 34) Kecamatan Bajuin; dan
- 35) Kecamatan Bumi Makmur.

B. Urusan Pilihan:

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - (3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - (4) Dinas Pariwisata; dan
 - (5) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL. SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 44



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BPKAD

NOMOR : 050.13 / 6 / BPKAD /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2025
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
 TANAH LAUT**

KEPALA BPKAD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);

15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan mekanisme penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sebagai berikut :
1. Mengacu pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025.
 2. Mengacu pada Visi, Misi, Agenda, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Indikator Capaian, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.
 3. Mengacu pada Renstra SKPD dan prioritas hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan.
 4. Mempedomani Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional
 5. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan nasional yang meliputi, Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, dan Pro Environment.

6. Menyelaraskan prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan/atau indikasi rencana program dalam RTRW Kabupaten Tanah Laut.
7. Mendukung dan mensinergikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 dengan program, tindakan, keluaran, target penyelesaian dan sasaran program pro rakyat, program pro keadilan, dan program tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goal's) sesuai dengan focus masing-masing program berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelayari
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP,M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/6/BPKAD/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2	Sekretaris BPKAD	Pengarah
3	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4	Kepala Bidang Akuntansi	Koordinator Bidang
5	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan	Koordinator Bidang
6	Kepala Bidang Penatausahaan Aset	Koordinator Bidang
7	Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset	Koordinator Bidang
8	Kasubbid Pendapatan & Pengelolaan Kas	Anggota
9	Kasubbid Akuntansi Belanja dan Beban	Anggota
10	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan	Anggota
11	Kasubbid Inventarisasi	Anggota
12	Kasubbid Pemanfaatan & Pemindahtanganan	Anggota
13	Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan	Anggota
14	Kasubbid Perbendaharaan & Pembiayaan	Anggota
15	Kasubbid Anggaran	Anggota
16	Kasubbag Keuangan	Anggota
17	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BPKAD,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 2425788
PELAIHARI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 050.13/ 14 / BPKAD/ 2024

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025..
 - : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 - : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

- Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Juli 2024

KEPALA BADAN,



MUHAMMAD DARMIN

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2025 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2025 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA –SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelaihari, 10 Juli 2024

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP. 19661227 198703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Strategis	19
2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... ..	29
BAB V PENUTUP	84



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 2425788

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2025
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 10 Juli 2024

KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

IP. 19661227 198703 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
 14. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

- d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebesar 91,43 % namun secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 pada umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja

secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 pagu anggaran murni sebesar Rp 285.240.884.026,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.537.244.894,- dengan realisasi pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp 274.778.042.543,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 91,43 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2023 yang telah menjadi Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=12/7x100%				14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							BPKAD		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	0,00	-	0,00	-	0	11.936.163.840	2.106.537.176	-	-	-	-	6.780.430	-	9.149.975	-	15.930.405	0,00%	88,36%	0,00	15.930.405	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ()	0,00	-	0,00	-	7	8.549.972	3	-	3	-	4	-	7	7.478.400	7	7.478.400	100,00%	87,47%	7,00	7.478.400	0,00%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun* ()	0,00	-	0,00	-	6	9.478.191	3	-	3	-	4	6.780.430	6	1.671.575	6	8.452.005	100,00%	89,17%	6,00	8.452.005	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu* (%)	0,00	-	0,00	-	0	8.126.931.919	-	1.554.086.278	-	2.478.886.817	-	1.496.075.055	-	2.086.258.506	-	7.615.306.656	0,00%	93,70%	0,00	7.615.306.656	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN* (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	8.113.769.343	-	1.549.254.578	6	2.478.832.317	9	1.495.874.655	12	2.081.763.770	12	7.605.725.320	100,00%	93,74%	12,00	7.605.725.320	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	0,00	-	0,00	-	94	13.162.576	12	4.831.700	14	54.500	35	200.400	57	4.494.736	57	9.581.336	60,64%	72,79%	57,00	9.581.336	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu* (%)	0,00	-	0,00	-	0	69.930.000	-	62.000.000	-	-	-	-	-	-	-	62.000.000	0,00%	88,66%	0,00	62.000.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya* (stel)	0,00	-	0,00	-	2	69.930.000	2	62.000.000	2	-	2	-	2	-	2	62.000.000	100,00%	88,66%	2,00	62.000.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	0,00	-	0,00	-	0	2.815.592.558	-	327.227.721	1	251.785.825	-	366.122.732	-	1.702.268.457	1	2.647.404.735	0,00%	94,03%	1,00	2.647.404.735	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	1	6.569.361	1	1.785.000	1	3.840.000	1	-	1	-	1	5.625.000	100,00%	85,62%	1,00	5.625.000	0,00%	0,00%		

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	5	1.120.200.835	5	26.000.400	5	11.455.000	5	16.850.000	5	951.905.000	5	1.006.210.400	100,00%	89,82%	5,00	1.006.210.400	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	3	72.822.362	3	14.673.600	3	7.500.000	3	11.578.500	3	29.672.500	3	63.424.600	100,00%	87,09%	3,00	63.424.600	0,00%	0,00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	-	0,00	-	250	1.616.000.000	-	284.768.721	100	228.990.825	200	337.694.232	225	720.690.957	225	1.572.144.735	90,00%	97,29%	225,00	1.572.144.735	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	-	0,00	-	0	780.768.000	-	151.261.527	-	146.568.398	-	148.130.257	-	161.184.951	-	607.145.133	0,00%	77,76%	0,00	607.145.133	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	312.000.000	3	39.178.127	6	36.522.878	9	41.884.733	12	47.339.435	12	164.925.173	100,00%	52,86%	12,00	164.925.173	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	-	0,00	-	1	468.768.000	1	112.083.400	1	110.045.520	1	106.245.524	1	113.845.516	1	442.219.960	100,00%	94,34%	1,00	442.219.960	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		-		124.913.200		11.961.650		18.509.000		22.902.450		54.006.200		107.379.300		85,96%		107.379.300		0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	1	16.250.000	1	3.938.900	1	2.682.900	1	4.552.000	1	4.225.000	1	15.398.800	100,00%	94,76%	1,00	15.398.800	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	15	68.750.000	15	6.622.750	15	9.876.100	15	13.800.450	15	21.773.700	15	52.073.000	100,00%	75,74%	15,00	52.073.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	36	19.800.000	36	1.400.000	36	5.950.000	36	4.550.000	36	7.900.000	36	19.800.000	100,00%	100,00%	36,00	19.800.000	0,00%	0,00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	2	20.113.200	2	-	2	-	2	-	2	20.107.500	2	20.107.500	100,00%	99,97%	2,00	20.107.500	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	98,60%	92,62%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
	KEUANGAN																								
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			-		-		270.000.377.529		99.363.108.370		24.791.120.024		90.452.044.600		31.756.321.991		246.362.594.985		91,25%		246.362.594.985		0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			-		-		537.393.669		21.394.000		33.450.000		110.557.600		180.888.070		346.289.670		64,44%		346.289.670		0,00%	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	59.643.027	-	-	-	1.500.000	2	32.990.000	2	9.179.400	2	43.669.400	100,00%	73,22%	2,00	43.669.400	0,00%	0,00%	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	48.646.200	40	-	40	2.250.000	40	26.958.600	40	11.152.000	40	40.360.600	100,00%	82,97%	40,00	40.360.600	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	14.844.613	40	-	40	-	40	-	40	14.124.500	40	14.124.500	100,00%	95,15%	40,00	14.124.500	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	14.844.699	40	-	40	-	40	-	40	13.590.500	40	13.590.500	100,00%	91,55%	40,00	13.590.500	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	*Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	3.800.610	-	-	-	-	2	-	2	1.182.800	2	1.182.800	100,00%	31,12%	2,00	1.182.800	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	40	3.871.950	40	-	40	-	40	-	40	1.022.000	40	1.022.000	100,00%	26,39%	40,00	1.022.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	207.129.980	-	18.000.000	-	27.000.000	2	14.907.000	2	71.360.470	4	131.267.470	200,00%	63,37%	4,00	131.267.470	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	154.312.113	-	750.000	-	2.400.000	2	32.102.000	2	44.435.000	2	79.687.000	100,00%	51,64%	2,00	79.687.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	28.341.775	-	2.644.000	-	300.000	2	3.600.000	2	13.155.000	2	19.699.000	100,00%	69,51%	2,00	19.699.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	1.958.702	-	-	-	-	-	-	3	1.686.400	3	1.686.400	100,00%	86,10%	3,00	1.686.400	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			-		-		280.844.392		29.483.800		55.276.404		51.607.000		88.482.517		224.849.721		80,06%		224.849.721		0,00%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	150	6.360.978	-	2.359.800	150	-	150	-	150	1.576.000	113	3.935.800	75,00%	61,87%	112,50	3.935.800	0,00%	0,00%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	49.336.132	-	18.960.000	-	3.881.250	-	8.040.000	1	6.005.500	1	36.886.750	100,00%	74,77%	1,00	36.886.750	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	2.250.000	4	-	4	-	4	1.350.000	4	-	4	1.350.000	100,00%	60,00%	4,00	1.350.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	14.456.000	-	-	-	5.764.000	-	7.942.000	1	600.000	1	14.306.000	100,00%	98,96%	1,00	14.306.000	0,00%	0,00%

		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	1.620.000	4	-	4	-	4	400.000	4	-	4	400.000	100,00%	24,69%	4,00	400.000	0,00%	0,00%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	13.326.000	1	5.764.000	-	2.882.000	-	3.480.000	1	-	2	12.126.000	100,00%	91,00%	2,00	12.126.000	0,00%	0,00%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	120	193.495.282	40	2.400.000	-	42.749.154	40	30.395.000	40	80.301.017	120	155.845.171	100,00%	80,54%	120,00	155.845.171	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			-		-		665.759.977		82.865.035		207.217.300		165.316.620		142.402.980		597.801.935		89,79%		597.801.935		0,00%
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00		0,00		0			-									0,00%		0,00		0,00%	
			*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	88.586.578	5	11.365.785		28.344.250		22.188.500	7	21.368.750	7	83.267.285	100,00%	94,00%	7,00	83.267.285	0,00%	0,00%
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	92.638.638	-	14.708.850	3	23.885.690	3	29.156.200	4	20.637.840	4	88.388.580	100,00%	95,41%	4,00	88.388.580	0,00%	0,00%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	0,00	-	0,00	-	7	157.191.942	-	6.984.930	4	24.079.710	4	55.580.320	7	52.691.490	7	139.336.450	100,00%	88,64%	7,00	139.336.450	0,00%	0,00%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	0,00	-	0,00	-	6	74.812.998	1	16.651.600	4	15.451.000	6	20.962.000	6	16.742.000	6	69.806.600	100,00%	93,31%	6,00	69.806.600	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	218.337.456	-	24.614.400	4	110.980.700	6	30.163.600	6	22.747.900	6	188.506.600	100,00%	86,34%	6,00	188.506.600	0,00%	0,00%

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	34.192.365	-	8.539.470	6	4.475.950	9	7.266.000	12	8.215.000	12	28.496.420	100,00%	83,34%	12,00	28.496.420	0,00%	0,00%			
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-		268.516.379.491		99.229.365.535		24.495.176.320		90.124.563.380		31.344.548.424		245.193.653.659		91,31%		245.193.653.659		0,00%			
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	130	246.343.464.346	130	99.227.465.536	130	24.226.676.320	130	90.124.563.380	130	31.074.048.424	130	244.652.753.660	100,00%	99,31%	130,00	244.652.753.660	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	22.172.915.145	-	1.899.999	-	268.500.000	-	-	1	270.500.000	1	540.899.999	100,00%	2,44%	1,00	540.899.999	0,00%	0,00%			
																				100,06%	91,25%							
																					Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-	-	-	-		18.600.703.525		4.378.744.516		3.816.131.999		291.998.274		8.873.406.534		17.360.281.323		93,33%		17.360.281.323		0,00%		BPKAD	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	-	-	-		18.600.703.525		4.378.744.516		3.816.131.999		291.998.274		8.873.406.534		17.360.281.323		93,33%		17.360.281.323		0,00%			
		Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	69.282.234	-	11.850.000	1	4.650.000	1	18.852.000	2	12.255.000	2	47.607.000	100,00%	68,71%	2,00	47.607.000	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	41	4.874.185.254	41	4.237.156.800	41	24.321.700	41	79.531.450	41	120.710.182	41	4.461.720.132	100,00%	91,54%	41,00	4.461.720.132	0,00%	0,00%			
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	49.896.438	-	36.480.000	1	1.530.000	1	1.020.000	1	720.000	1	39.750.000	100,00%	79,67%	1,00	39.750.000	0,00%	0,00%			
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	16	281.168.559	-	38.292.916	-	60.309.999	-	72.810.599	16	96.447.082	16	267.860.596	100,00%	95,27%	16,00	267.860.596	0,00%	0,00%			
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	86.237.535	-	3.150.000	-	17.366.250	-	27.486.250	1	26.462.000	1	74.464.500	100,00%	86,35%	1,00	74.464.500	0,00%	0,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	396.675.125	-	20.957.500	-	71.367.750	-	23.247.500	2	45.603.254	2	161.176.004	100,00%	40,63%	2,00	161.176.004	0,00%	0,00%			
		Penilaian Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	177.064.980	-	10.470.000	-	6.210.000	-	12.050.000	5	107.861.918	5	136.591.918	100,00%	77,14%	5,00	136.591.918	0,00%	0,00%			
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	12.407.911.235	-	4.457.300	-	3.585.505.800	-	13.069.975	2	8.356.025.254	2	11.959.058.329	100,00%	96,38%	2,00	11.959.058.329	0,00%	0,00%			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-hentinya. Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian akuntabel yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan agar tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita capai 11 (Sebelas) tahun berturut-turut ini..

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

- 1). Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang

lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

- 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
- 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan pengelola keuangan daerah.

Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini :

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi Tahun		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	12			13
1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			BAIK(82)	BAIK(83)	BAIK(84)	BAIK(85)	BAIK(86)	90	93	94,19	95	97,02	98,5	99	
3	Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan			87%	89%	90%	92%	95%	100%	33,70%	155,55%	118,48%	63,16%	100%	100%	
7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	
	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	120%	133,30%	500%	100%	100%	
7	Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	108,80%	2700%	850%	1170%	245%	100%	100%	
11	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	-	66	67	68	69	70	74,98	88,43	88,91	80,50	81,50	82	83	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2018 sampai dengan Daerah tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2023 selama 5 (lima) tahun Renstra, sedangkan sampai dengan tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
2. Indikator Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah capaian kinerja dari tahun 2018 sd 2023 mengalami kenaikan kinerja, sedangkan untuk proyeksi tahun 2024 ditargetkan terdapat kenaikan kinerja.

3. Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan dengan capaian dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
4. Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
5. Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
6. Indikator Sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
7. Indikator Sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 mengalami penurunan kinerja setiap tahunnya disebabkan adanya kendala pada Kantor Agraria, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
8. Indikator Sasaran Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 tidak tercapai dikarenakan tidak adanya permohonan sedangkan untuk tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
9. Indikator Sasaran Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai rata-rata melebihi dari 100%, dan untuk tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
10. Indikator Sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
11. Indikator Sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.

12. Indikator Sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
13. Indikator Sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 mengalami kenaikan kinerja diatas 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.
14. Indikator Sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
15. Indikator Sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
16. Indikator Sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
17. Indikator Sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2023 tercapai 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan juga tercapai 100%.
18. Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun 2018 sd tahun 2023 mengalami kenaikan melebihi 100%, sedangkan tahun 2024 diproyeksikan tercapai 100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 18 indikator sasaran kinerja selama 5 (lima) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun secara per indikator sasaran ada yang tercapai, namun ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan atau melebihi target, namun secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat baik hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah telah tercapai, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.3. Isu – Isu Strategis

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No.	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Terbatasnya jumlah PNS pada BPKAD yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah PNS yang memiliki pendidikan spesifik pengelolaan keuangan dan aset 2. Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan dan aset yang terintegrasi dan konsisten.
2.	Belum seimbang antara Rencana Pendapatan Daerah dengan Rencana Belanja Daerah dalam APBD sehingga APBD defisit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola pendapatan dalam merencanakan pendapatan. 2. Perencanaan pendapatan masih disusun bersifat inkremental bukan berdasarkan potensi yang ada. 3. Terlambatnya informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan rencana pendapatan bagi hasil dan rencana dana perimbangan.
3.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD masih belum tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya SKPD dalam menyusun RKA , sehingga memperpanjang pembahasan RKA oleh TAPD. 2. Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD di legislatif.
4.	Penetapan Perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum lancarnya proses

	tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih belum tepat waktu	<p>penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tertibnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran dan tahunan 3. Lamanya proses reviu atas LKPD oleh Itwilkab. 4. Berlarut-larutnya proses pembahasan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di legislatif.
5.	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya pengguna barang dan pengurus barang dalam mengelola barang SKPD. 2. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan barang daerah. 3. Belum tertibnya penyampaian laporan berkaitan dengan barang SKPD 4. Sebagian masih ditemukan oleh auditor pencatatan aset yang belum diyakini kewajarannya.
6.	Belum semuanya ketentuan lebih lanjut (Perda, Perbup, SK) tentang pengelolaan keuangan dan aset diterbitkan/disesuaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset. 2. Beban kerja yang cukup tinggi. 3. Cepatnya perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.
7.	Belum optimalnya pengelolaan bantuan hibah dan bantuan social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang Bantuan Hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD terkait dan Organisasi / masyarakat.
8.	Belum diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat/SKPD berkaitan dengan pemberian layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dibuatnya kotak saran/ aduan masyarakat/SKPD 2. Belum terorganisirnya penanganan pengaduan masyarakat/SKPD
9.	Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya PNS yang memiliki pendidikan kearsipan/dokumentasi 2. Terbatasnya ruangan untuk pengelolaan arsip/dokumentasi
10.	Belum tertibnya penyajian data dan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terfokusnya PNS yang mengelola penyajian data dan informasi.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat

dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi menyusun RKA-SKPD.

Program dan kegiatan yang disusun tentunya harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Sedangkan program dan kegiatan yang diusulkan dari pemangku kepentingan tahun 2025 dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C. 32 dibawah ini sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- c) Adanya simda keuangan.
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar secepatnya dari Opini WDP menuju WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .

- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
- g) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.
- c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).

- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
 - e) Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.
 - f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.
 - g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.
 - h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
- 2) Faktor penghambat :
- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.
 - b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.
 - c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
 - d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.
 - e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
 - f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
 - g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

A. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP Kabupaten

2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan indikatornya adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan indikatornya adalah Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPKAD

Dengan indikatornya adalah Nilai SAKIP BPKAD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

4.1 Program dan Kegiatan

A. Program

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Barang Milik daerah

B. Kegiatan

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi penyusunan RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun kegiatan- kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
 - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.5. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 6.2. Pengadaan Mebel
 - 6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - 6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 7.4. Penyediaan Jasa Umum kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 9.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 9.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
 - 9.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - 9.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - 9.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD
 - 9.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
 - 9.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 9.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 9.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 9.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 10.1. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 10.2. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunaidengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 10.3. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
 - 10.4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - 10.5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

- 10.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 11. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 11.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - 11.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - 11.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - 11.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 11.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
 - 11.6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - 11.7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - 11.8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- 12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 12.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 12.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- 13. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 13.1. Penyusunan Standar Harga
 - 13.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah,
 - 13.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 13.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - 13.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
 - 13.6. Pengamanan Barang Milik Daerah
 - 13.7. Penilaian Barang Milik Daerah
 - 13.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 13.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,

- Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 13.10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 13.11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						332.905.977.759,00							4.820.232.946.154,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						332.905.977.759,00							4.820.232.946.154,00		
	5.02	KEUANGAN						332.905.977.759,00							4.820.232.946.154,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Sekretariat BPKAD	88 Nilai			88 Nilai	12.189.103.281,00						88 Nilai	12.917.885.919,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 Persen	13.991.158,00			Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	-	20.659.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	8.993.175,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	9.891.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	4.997.983,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerinta han yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	10.767.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIODE RENS TRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAI AN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02	Admini strasi Keuan gan Peran gkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	8.827.656.333,00			Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BPKA D kabup aten Tanah Laut	-	9.312.226.569,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	8.820.656.466,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BPKA D kabup aten Tanah Laut		97.226.569,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>				350 Dokumen	6.999.867,0 0	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BPKA D kabup aten Tanah Laut	15.000.000,00	BADAN PENGELOAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------------	---	---	---	---	---	---------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	47.462.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	37.462.500,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
--	--	--	---	--	--	--	---------	---------------	--	------------------------------	--	---	-----------------------------------	---------------	--

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase Capaian Admin istrasi Umum Peran gkat Daerah	-			100 Persen	1.769.247.602,00			Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	-	1.835.000.000,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.984.679,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	130.499.274,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	9.992.657,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan</i>				2 Paket	49.999.792,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				2 Paket	15.000.000, 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyeenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RESTRARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	1.500.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	28.771.200,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	546.290.072,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	-	550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut		.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				14 Unit	99.936.372,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten Tanah Laut	}.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	146.353.700,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		250.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	250.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	849.921.716,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	-	950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	350.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	499.921.716,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	134.533.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	-	175.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				15 Unit	64.608.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				22 Unit	24.925.900,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE TRAJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Kantor BPKAD kabupaten TanahLaut		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu</i>	100 Persen			100 Persen	312.711.451.651,00						100 Persen	305.147.360.235,00	

5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>	-			100 Perse n	498.458.313,0 0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyeleenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut	-	641.031.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
		<i>Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang Disusun</i>				2 Doku men	43.933.562,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyeleenggaraan Tata kelola Peme	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

												ntahan yang Baik				
	5.02.02.2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	43.678.858,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	16.301.779,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM YA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0004		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				40 Dokumen	16.320.405,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				40 Dokumen	4.136.885,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		37.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>				40 Dokumen	4.235.743,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		37.830,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>				2 Dokumen	179.730.163,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukha dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	.878.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>				2 Dokumen	158.964.406,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyeleenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		5.401.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</i>				6 Dokumen	31.156.512,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		32.175.975,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											nggaraan Tata kelola Pemerint ahan yang Baik				
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</i>	-			100 Persen	159.687.321,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	243.329.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSTRANSRAOPD	REALISASI CAPAIAN RENJANRENJAOPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANRENJAOPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kasdan SPD</i>				84 Dokumen	14.797.621,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyeleenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		15.929.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah</i>				1 Dokumen	59.968.40 2,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</i>				2 Dokumen	19.928.21 8,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		38.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE TRAJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan</i>				2 Dokumen	9.999.829,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		18.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				120 Orang	54.993.251,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>	-			100 Persen	799.995.386,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut	-	1.263.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				7 Laporan	119.997.321,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		00.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	89.999.657,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		00.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

			<i>Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				8 Laporan	199.999.69 1,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut	00.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.00 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				6 Laporan	94.999.606,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan</i>				6 Dokumen	189.999.606,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten TanahLaut		235.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

			APBD Kabupaten/Kota												
5.02.02.2.03.00 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	34.999.782 ,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	116.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.00 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE TRANSFORMASI	REALISASI CAPAIAN RENJANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				120 Orang	69.999.723,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	-			100 Persen	311.253.310.631,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	303.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				130 Laporan	286.253.310.6 31,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Pemeri ntah Kabupa ten Tanah Laut	1.000.000.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.2.04.00 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesa k</i>				1 Laporan	25.000.000.000,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		25.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</i>	100 Persen			100 Persen	8.005.422.827,00						100 Persen	4.502.167.700.000,00	

5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	8.005.422.827,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	-	4.502.167.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	79.998.464,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANS TRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				41 Dokumen	4.999.983.626,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	00.000.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>				1 Dokumen	44.999.462,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	50.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah</i>				16 Laporan	349.999.614, 00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemer intah Kabup aten Tanah Laut	367.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.03.2.01.00 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	79.999.649,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	98.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>				3 Laporan	941.312.125,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	60.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i>				5 Laporan	222.131.376,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	97.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	1.108.999.335,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	325.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				8 Dokumen	89.999.858,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelesaian Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	150.000.000,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

			<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>				8 Laporan	24.999.651,0 0	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam Dan Tra nsforma si Pelayan an Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyele nggaraan Tata kelola Pemerintah an yang Baik	Pemerinta h Kabupate n Tanah Laut	0.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.00 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				80 Orang	62.999.667,00	Kab. Tanah Laut, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	04. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi 03. Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang Baik	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut		85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J U M L A H								332.905.977.759,00							4.820.232.946.154,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan rekapitulasi usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut bahwa Usulan Program sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan total jumlah usulan sebesar Rp 332.905.977.759,00 dan Prakiraan maju tahun 2026 sebesar Rp 324.732.946.154,00,-.

REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No	Gaji dan TPP	Belanja Operasi (Barang dan Jasa)	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Transfer	Belanja Sosial (Terduga/tidak Terduga)	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7

1	Rp 8.820.656.466,-	-	-	-	-	-	45 Jlh ASN BPKAD
2	-	Rp 31.618.020.662,-	-	-	-	-	-
3	-	-	Rp 1.213.990.000,-	-	-	-	Rp. 1.213.990.000,- Belanja Modal Tanah dan BM Tugu/Tanda Batas
5	-	-	-	-	Rp 266.253.310.631,-	-	Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
6				-		Rp 25.000.000.000,-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah	Rp 8.820.656.466,-	Rp 31.618.020.662,-	Rp 1.213.990.000,-	Rp -	Rp 266.253.310.631,-	Rp 25.000.000.000,-	Rp 332.905.977.759,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024 – 2026 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

RENJA –SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 10 Juli 2024
Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



Muhammad Darmin, S.IP, M.Si
NIP. 19661227 198703 1 002